

STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DI TENGAH POTENSI KONFLIK ASIA PASIFIK: AUKUS (AUSTRALIA, INGGRIS, DAN AMERIKA SERIKAT) VS REPUBLIK RAKYAT CHINA

INDONESIA'S SEA DEFENSE STRATEGY AMID POTENTIAL ASIA PACIFIC CONFLICT: AUKUS (AUSTRALIA, UK AND UNITED STATES) VS PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Rizky Thesalonika Yulyanti R¹, Lukman Yudho Prakoso², Aries Sudiarso³

STRATEGI PERTAHANAN LAUT, FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

(rizkythesalonika@gmail.com, lukman.prakoso@outlook.com, aries.25st@yahoo.co.id)

Abstraksi-Indonesia merupakan negara yang berada di Kawasan Asia Pasifik yang secara geografi berada di wilayah Asia Tenggara dan berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Australia. Dengan posisi geografis ini, strategi pertahanan laut Indonesia yakni Poros Maritim Dunia harus diperhatikan kembali melihat bahwa Republik Rakyat Tiongkok telah melakukan inisiasi dalam mencapai ambisinya guna mencapai hegemoni di Kawasan Asia Pasifik melalui klaim *nine dash line* hingga pembentukan *Belt Road Initiative (BRI)* dengan menggunakan *silk road*. Dalam merespon hal ini, Amerika Serikat bersama Australia dan Inggris kemudian membentuk aliansi pertahanan dan keamanan dengan menjamin keamanan Kawasan Asia Pasifik yang kemudian meningkatkan tendensi konflik di Kawasan. Untuk melihat strategi pertahanan laut, penelitian ini menggunakan teori strategi maritim dan teori kekuatan laut untuk melihat kemampuan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam penyusunan penelitian. Hasil dari penelitian ini yakni Indonesia harus mempertimbangkan kembali Poros Maritim Dunia sebagai strategi pertahanan laut melihat bahwa perkembangan aktivitas wilayah perairan di Kawasan Asia Pasifik meningkat disertai dengan tendensi konflik yang semakin tinggi antara Republik Rakyat Tiongkok dan AUKUS.

Kata Kunci: AUKUS, Indonesia, Kawasan Asia Pasifik, Republik Rakyat Tiongkok, Strategi Pertahanan Laut

Abstract- Indonesia is a country located in the Asia Pacific Region which is geographically located in the Southeast Asia region and is directly adjacent to the People's Republic of China and Australia. With this geographical position, Indonesia's maritime defense strategy, namely the Global Maritime Fulcrum, must be reconsidered seeing that the People's Republic of China has initiated its ambition to achieve hegemony in the Asia Pacific Region through the nine-dash line claim to the establishment of the Belt Road Initiative (BRI) using silk road that has been planned. In response to this, the United States of America together with Australia and Britain then formed a defense and security alliance by ensuring the security of the Asia Pacific Region which then increased the tendency for conflict in the Region. To see the maritime defense strategy, this study uses the theory of maritime strategy and the theory of sea power to see Indonesia's capabilities. This study uses qualitative methods in the preparation of research. The result of this research is that Indonesia must reconsider the World Maritime Axis as a marine defense strategy seeing that the development of territorial water activities in the Asia Pacific Region is increasing accompanied by a higher tendency for conflict between the People's Republic of China and AUKUS.

Keywords: AUKUS, Asia Pacific Region, Indonesia, Maritime Defense Strategy, People Republic's of China, Maritime Defense Strategy

Pendahuluan

Penelitian ini akan mengkaji mengenai strategi pertahanan laut yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam membendung potensi konflik di Asia Pasifik setelah pembentukan aliansi AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat) sebagai bentuk perlawanan secara tidak langsung terhadap dominasi Republik Rakyat Tiongkok. Penelitian ini nantinya akan memaparkan hasil prediktif mengenai apa saja strategi yang mampu diterapkan oleh Indonesia dalam membendung intensitas konflik yang semakin tinggi antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat melalui aliansi AUKUS.

Di masa sekarang ini, potensi konflik di wilayah Asia Pasifik tentunya semakin tinggi. Hal ini dapat terlihat pada upaya hegemoni Republik Rakyat Tiongkok di wilayah Asia Pasifik melalui dominasi di berbagai sektor inti pada interaksi internasional seperti pertahanan dan keamanan, ekonomi, kesehatan, serta sosial budaya. Ambisi Republik Rakyat Tiongkok sendiri bukan tanpa alasan melihat bahwa ambisi tersebut didukung oleh kondisi geografisnya dimana Republik Rakyat Tiongkok memiliki luas wilayah sebesar 9,69 juta km² dan didukung oleh sumber daya alam serta

sumber daya manusia yang terbanyak di dunia dengan angka 1,35 milyar (Bamboo Cyberschool, 2019).

Dalam upaya untuk mencapai ambisi tersebut, Republik Rakyat Tiongkok mengawalinya dengan penggambaran *nine dash line* pada Laut China Selatan yang dianggap sebagai wilayah Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan klaim pada sejarah. Sebelumnya, Republik Rakyat Tiongkok menarik sebelas garis putus-putus pada tahun 1947 guna menandakan wilayahnya, akan tetapi di tahun 1950, dua garis putus-putus kemudian dihapus karena merupakan teritori dari Vietnam (Sakamoto, 2021). Laut China Selatan sejatinya merupakan kawasan perairan sebesar 3.5 Juta km² yang berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam (Gao & Ja, 2013). *Nine dash line* sendiri merupakan sembilan garis putus-putus yang dikemukakan oleh Republik Rakyat Tiongkok dalam menentukan batas wilayahnya dengan menggunakan sumber daya alam seperti pulau kecil, terumbu karang, dan bebatuan serta klaim atas empat kepulauan yaitu Kepulauan Paracel, Kepulauan Pratas, Kepulauan Zhongsha, dan Kepulauan

Spratly yang berdasarkan posisi geografisnya Laut China Selatan membentuk jalur vital perdagangan dan transportasi maritime untuk Asia Timur dan Asia Tenggara serta memudahkan ekspansi pasar hingga di wilayah Afrika (Thao & Amer, 2012).

Dalam upaya klaim atas wilayah Laut China Selatan, Republik Rakyat Tiongkok mendapatkan respon keras dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara terbagi menjadi tiga bagian meliputi *front-line states* meliputi Filipina dan Vietnam dan *Claimant States* meliputi Malaysia dan Brunei Darussalam (Thayer, 2016). Sedangkan *non-claimant states* meliputi Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Myanmar (Suwanti & Suharto, 2020). Permasalahan yang didapati pada *nine dash line* yang dikemukakan oleh Republik Rakyat Tiongkok yakni adanya pelanggaran terhadap konvensi UNCLOS 1982 dimana telah dialami oleh negara *front-line states* dan *claimant states* dengan pelanggaran terhadap ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yang telah disepakati sebelumnya dan telah diamini oleh Republik Rakyat Tiongkok dengan melakukan ratifikasi pada perjanjian tersebut dan mengeluarkan pernyataan bahwa hak dan kepentingan maritim

harus diawali dengan kedaulatan territorial (Wang, 2015).

Republik Rakyat Tiongkok kemudian membentuk inisiasi lain dalam upaya mendominasi Asia melalui *Belt and Road Initiative*. Inisiasi ini merupakan wujud program kebijakan dan investasi jangka panjang lintas benua yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur dan percepatan integrasi ekonomi negara-negara di sepanjang jalur *silk-road* yang bersejarah. Inisiatif ini diresmikan pada tahun 2013 oleh Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping dan hingga tahun 2016, dikenal sebagai OBOR – One Belt One Road. Pada tanggal 28 Maret 2015, garis besar dari Belt and Road Initiative telah dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), Kementerian Luar Negeri (MOFA) dan Kementerian Perdagangan (MOFCOM) Republik Rakyat China (RRT), dengan otorisasi Dewan Negara (Belt and Road Initiative, 2021). Strategi pengembangan *Belt and Road Initiative* (BRI) Republik Rakyat Tiongkok bertujuan untuk membangun konektivitas dan kerjasama di enam koridor ekonomi utama yang meliputi Cina, Mongolia, Rusia, negara-negara Eurasia, Asia Tengah dan Barat, Pakistan, negara lain di anak benua India, dan

Kawasan Asia Tenggara. Pengembangan BRI ini mengedepankan konektivitas, keterbukaan, motivasi pembangunan berkelanjutan, motivasi keamanan pangan dan energi, dan pembangunan regional yang seimbang (OECD, 2018). Dengan melihat peta penetapan BRI ini kemudian secara tidak langsung memperlihatkan usaha Republik Rakyat Tiongkok untuk mendominasi dunia terutama Kawasan Asia Pasifik. Dengan melihat ambisi besar Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat selaku negara yang paling berpengaruh di dunia tentunya merespon karena dengan adanya inisiatif ini tentunya mengaburkan pengaruh Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik.



Gambar 1. Jalur Belt and Road Initiative Republik Rakyat Tiongkok
 Sumber: Magdalena, 2021

Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya hingga saat ini terus mengupayakan pengaruhnya di kancah internasional. Akan tetapi, melihat pergerakan Republik Rakyat Tiongkok di

Kawasan Asia Pasifik yang terus berkembang dan berinovasi dalam membentuk kerjasama antar negara-negara Asia dan inisiasi baru serta meningkatnya alutsista guna pertahanan dan keamanannya tentunya menjadi ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat. Dengan alasan tersebut kemudian Amerika Serikat terus berupaya menangkal pengaruh Republik Rakyat Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik.

Di tahun 2021, Amerika Serikat berhasil menginisiasi pembentukan aliansi pertahanan dan keamanan bersama dengan Australia dan Inggris tepatnya pada 15 September 2021 Perdana Menteri Boris Johnson, Presiden AS Joseph Biden dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengeluarkan pernyataan bersama mengumumkan pembentukan “peningkatan kemitraan keamanan trilateral” disebut AUKUS (Australia, Inggris dan Amerika Serikat) (Brooke-Holland, Curtis, & Mills, 2021). Alasan terbentuknya aliansi ini melihat bahwa tantangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik telah berkembang secara signifikan. Modernisasi militer terjadi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kemampuan berkembang pesat dan jangkauannya

meluas (Prime Minister of Australia, 2021).

AUKUS kemudian mengemukakan inisiatif dalam peningkatan pertahanan dan keamanan khususnya di wilayah Asia Pasifik dengan inisiatif pertama di bawah AUKUS yakni agar Australia memperoleh teknologi kapal selam bertenaga nuklir, memanfaatkan pengalaman puluhan tahun dari AS dan Inggris. Di bawah AUKUS, ketiga negara akan segera fokus pada identifikasi jalur optimal untuk mengirimkan setidaknya delapan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia (Prime Minister of Australia, 2021). Melalui AUKUS, negara-negara anggota akan memperkuat kemampuan masing-masing untuk mendukung kepentingan keamanan dan pertahanan, membangun hubungan bilateral yang sudah berlangsung lama dan berkelanjutan. Aliansi akan mempromosikan berbagi informasi dan teknologi yang lebih dalam. Aliansi akan mendorong integrasi yang lebih dalam dari ilmu pengetahuan, teknologi, basis industri, dan rantai pasokan yang terkait dengan keamanan dan pertahanan. Dan khususnya, Aliansi akan secara signifikan memperdalam kerja sama di berbagai kemampuan keamanan dan pertahanan. Aliansi AUKUS pun mengarusutamakan

pertahanan perdamaian dan stabilitas di Kawasan Asia Pasifik (United States of Amerika, 2021).

Melihat tendensi konflik antara Republik Rakyat Tiongkok dan Aliansi AUKUS, Indonesia perlu melakukan antisipasi dengan menyiapkan strategi pertahanan laut secara massif melihat bahwa intensitas konflik di Kawasan Asia Pasifik terutama di wilayah utara Indonesia yakni Laut China Selatan dan di wilayah Selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia. Antisipasi yang harus dilihat oleh Indonesia meliputi pergerakan Republik Rakyat Tiongkok setelah kasus klaim wilayah Laut China Selatan yang mengambil wilayah perairan Pulau Natuna serta patroli tentara Angkatan laut Republik Rakyat Tiongkok yang massif dilakukan guna upaya spionase tentunya akan menjadi perhatian khusus.

Di wilayah selatan Indonesia sendiri, Indonesia harus menyiapkan antisipasi terhadap perkembangan pertahanan militer dan keamanan Australia yang dibantu oleh Amerika Serikat melalui AUKUS dilihat dari inisiatif pertamanya bahwa AUKUS mengakui tradisi bersama negara anggota aliansi sebagai negara demokrasi maritime dan berkomitmen pada ambisi bersama untuk mendukung

Australia dalam memperoleh kapal selam bertenaga nuklir untuk Angkatan Laut Australia (United States of Amerika, 2021). Pengembangan kapal selam bertenaga nuklir ini meskipun diperuntukkan untuk mengadu perkembangan militer Republik Rakyat Tiongkok, akan tetapi Indonesia patut untuk berwaspada melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang diapit oleh negara-negara dengan kekuatan yang besar dan tendensi konflik yang meningkat tentunya akan mengenai Indonesia secara langsung.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dipaparkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik (misalnya, teks, video, atau audio) untuk memahami konsep, pendapat, atau pengalaman. Ini dapat digunakan untuk mengumpulkan wawasan mendalam tentang suatu masalah atau menghasilkan ide-ide baru untuk penelitian. Setiap pendekatan penelitian melibatkan penggunaan satu atau lebih metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian sekunder dengan mengumpulkan data yang ada berupa

teks, gambar, rekaman audio atau video, dll.

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teori strategi pertahanan laut (*Maritime Strategy*) dan *Sea Power*. Teori ini nantinya akan membantu dalam menganalisis dan melihat strategi pertahanan laut yang akan diaplikasikan oleh Indonesia dalam membendung tendensi konflik antara Republik Rakyat Tiongkok dan Aliansi AUKUS.

Hasil dan Pembahasan Strategi Maritim

Strategi maritim sangat penting dalam perencanaan militer karena negara menyediakan sarana untuk menerapkan kekuatan ke wilayah yang diminati di sepanjang garis pantai dan pedalaman. Daerah ini disebut litoral. Pesisir didefinisikan 'sebagai daerah ke arah laut dari pantai yang rentan terhadap pengaruh atau dukungan dari darat dan daerah pedalaman dari pantai yang rentan terhadap pengaruh dari laut. Operasi pertahanan di pesisir memerlukan kebutuhan untuk efektif dalam operasi bersama (Sea Power Centre Australia, 2013). Di masa sekarang ini, Strategi maritim modern melibatkan kekuatan udara, laut dan darat yang

beroperasi bersama untuk mempengaruhi peristiwa di pesisir bersama-sama dengan konsep maritim tradisional tentang penolakan laut dan kontrol laut. Strategi maritim saat ini bukan hanya tentang kekuatan angkatan laut atau strategi angkatan laut. Elemen kunci dari strategi maritim meliputi *sea denial*, *sea control*, dan *power projection* (Parliament of Australia, 2018).

Sea denial memiliki 'tujuan pencegahan penggunaan laut' oleh orang lain yang memiliki kekuatan yang mengancam sebuah negara. Hal ini didefinisikan sebagai kondisi yang ada ketika sebuah musuh ditolak kemampuannya untuk menggunakan wilayah laut untuk tujuannya sendiri untuk jangka waktu tertentu. *Sea Denial* menyiratkan postur yang lebih pasif di mana penekanannya adalah pada pertahanan (walaupun ini tidak menghalangi penggunaan kemampuan ofensif), dan di mana inisiatif akan tetap dengan kekuatan menyerang.

Sea control didefinisikan sebagai kondisi yang ada ketika suatu pihak memiliki kebebasan bertindak untuk menggunakan suatu wilayah untuk kepentingannya sendiri dalam jangka waktu tertentu dan menolak

penggunaannya wilayah laut untuk lawan.

Proyeksi kekuatan meskipun tidak secara eksklusif merupakan konsep strategis maritim, mengakui bahwa kekuatan maritim, melalui Kontrol Laut, dapat membentuk, memengaruhi, dan mengendalikan lingkungan strategis, dan dapat mengirimkan kekuatan tempur ke darat jika diperlukan. Proyeksi kekuatan dalam kaitannya dengan strategi maritim, adalah tentang penggunaan kekuatan maritim untuk mempengaruhi urusan di darat.

Menurut Corbett (2004), ia mendefinisikan strategi maritime sebagai "bagian apa yang harus dimainkan armada dalam kaitannya dengan aksi pasukan darat" dan perhatian utamanya adalah "menentukan hubungan timbal balik antara tentara dan angkatan laut dalam rencana perang." Angkatan Laut saat ini berkomitmen untuk operasi Pasukan Gabungan dan koalisi di atau di darat, laut, udara, ruang angkasa dan media informasi di mana Pasukan Gabungan menjalankan Strategi Militer Nasional dan melakukan perang. Pada dasarnya Angkatan Laut beroperasi dalam kerangka strategi maritim, di mana kekuatan non-angkatan laut dapat digunakan untuk tujuan yang secara

tradisional terkait dengan laut. Kebijakan angkatan laut saat ini mencerminkan hal ini dengan mencoba memberikan langsung pengaruh yang menentukan dan berkelanjutan dalam mencapai kepentingan bersama.

Bagi Corbett, tidak ada satu cara pun di mana angkatan laut mencapai semua tujuannya. Sementara tujuan pertama perang angkatan laut adalah untuk “baik secara langsung atau tidak langsung untuk sementara mengamankan komando laut, atau untuk mencegah musuh mengamatkannya, komando laut bukan satu-satunya tujuan perang laut. Mendefinisikan komando laut sebagai kontrol lokal dari komunikasi maritim, untuk sarana militer atau komersial, Corbett menghargai komando laut lokal atas kontribusi angkatan laut yang dibawanya ke tujuan langsung strategi maritim pada waktu dan tempat. Oleh karena itu, perang angkatan laut tidak hanya terdiri dari metode untuk mencapai komando laut lokal, tetapi juga metode untuk menjalankan perintah itu untuk tujuan strategis.

Corbett membedakan metode komando lokal laut yang diperoleh dan yang digunakan dalam strategi melalui studinya tentang sejarah dan analisis peristiwa kontemporer. Corbett

mencatat bahwa angkatan laut mungkin tidak selalu berusaha untuk "*command of the sea*", tetapi mungkin, dalam menolak penggunaannya, "membantah" komando tersebut. Metodenya untuk mengamankan dan memperdebatkan komando, dan menjalankan komandi diringkas di bawah ini:

1. Metode mengamankan komando
 - a. Dengan memperoleh keputusan
 - b. Dengan Blokade
2. Metode memperdebatkan komando
 - a. Prinsip penggunaan alutsista militer yang ada
 - b. Mengedepankan serangan balik dengan skala kecil
3. Metode melakukan komando
 - a. Pertahanan terhadap invasi militer melalui laut
 - c. Meningkatkan pertahanan perdagangan melalui serangan
 - d. Mengedepankan serangan sebagai bentuk pertahanan dengan dukungan ekspedisi militer

Sea Power

Dalam teori *Sea Power* yang dikemukakan oleh Mahan (1890), Dua aspek kunci dari teori kekuatan laut

Mahan adalah strategi angkatan laut dan geopolitik yang terkait dengan komando laut. Menurut Mahan, keterkaitan antara persaingan komersial di era kolonial dan niat kekuatan kolonial untuk berekspansi membuat konflik bersenjata tak terhindarkan. Dengan terbukanya sistem transportasi laut dunia yang membawa kemakmuran bagi kekuatan kolonial, maka keamanan transportasi laut hanya dapat dipastikan dengan kekuatan angkatan bersenjata laut yang kuat. Ada hubungan internal tertentu antara angkatan laut, komando laut dan kekuatan maritim.

Angkatan laut yang kuat akan meletakkan dasar bagi suatu negara untuk menguasai laut. Namun, yang pertama belum tentu mengarah ke yang terakhir. Terlepas dari kekuatan angkatan laut, strategi angkatan laut yang benar harus dirumuskan jika suatu negara ingin mengambil alih komando laut yang sebenarnya. Mahan berpendapat bahwa tujuan akhir dari strategi angkatan laut adalah untuk menjaga dan meningkatkan kekuatan laut suatu negara, tidak peduli di masa perang atau damai. Kekuatan laut, atau lebih spesifik lagi, komando laut sangat bergantung pada strategi angkatan laut dan angkatan laut suatu negara. Tanpa angkatan laut yang cukup

kuat dan strategi angkatan laut yang efektif, mustahil untuk mengontrol wilayah laut tertentu. Negara musuh lainnya mungkin menggunakan wilayah laut untuk bertindak sebagai blokade atau untuk melancarkan serangan (University of Birmingham, 2015). Oleh karena itu, kekuatan laut tidak akan muncul tanpa kombinasi yang efektif dari kekuatan angkatan laut dan strategi angkatan laut.

Menurut Mahan, hanya dengan menggabungkan angkatan laut yang kuat dengan strategi angkatan laut yang tepat, komando laut pada akhirnya dapat terwujud. Ketika datang ke strategi angkatan laut, klarifikasi harus dibuat antara strategi ofensif dan strategi defensif. Strategi pertahanan dapat dibagi lagi menjadi strategi pertahanan pantai dan strategi pertahanan laut. Strategi sebelumnya menekankan pertahanan daratan. Kegiatan militer terbatas untuk memukul mundur serangan langsung, dengan tentara bertanggung jawab untuk pertahanan dan angkatan laut bertanggung jawab untuk menciptakan sabuk pertahanan di lepas pantai.

Komando laut bukanlah kombinasi sederhana dari angkatan laut yang kuat dan strategi angkatan laut yang ofensif.

Hal ini juga memerlukan kondisi geopolitik yang kondusif sehingga angkatan laut dapat menjalankan peran strategisnya. Hal ini ditentukan oleh persyaratan khusus dari faktor-faktor geografis terhadap kekuatan laut. Mahan berpendapat bahwa setelah suatu negara membangun kekuatan militer maritim yang kuat, ia harus menduduki atau merebut lokasi geografis yang menguntungkan untuk menerapkan strategi angkatan lautnya sehingga pada akhirnya dapat mengasumsikan komando laut. Ada beberapa faktor kunci yang menentukan apakah strategi angkatan laut suatu negara dapat mendukung tujuannya untuk mengambil alih kekuatan laut, misalnya, lokasi geografis untuk penyebaran yang efektif dari angkatan laut. angkatan laut antara daratan, pangkalan militer luar negeri dan garis depan strategis dan pulau-pulau atau pelabuhan di dekat rute laut penting, yang bergantung pada ekonomi maritim atau kekuatan militer negara tersebut. Singkatnya, ada dua prinsip dalam teori kekuatan laut Mahan:

1. Keamanan di perairan tetangga adalah kriteria mendasar dari setiap negara yang ingin menjadi kekuatan maritim. Untuk mengamankan keamanan maritim, negara harus

secara efektif mengendalikan perairan dan pulau-pulau yang dapat mengancam keamanannya sendiri apabila diduduki oleh musuh. Ini merupakan kekuatan laut tingkat pertama yang dimiliki oleh sebuah kekuatan maritim dan juga merupakan landasan strategis bagi sebuah kekuatan maritim untuk bergerak dari perairan lepas pantai ke laut jauh.

Mewujudkan keamanan perairan lepas pantai hanya dasar dan bukan secara keseluruhan untuk membangun suatu negara menjadi kekuatan maritim. Atas dasar keamanan, ruang lingkup kekuatan laut suatu kekuatan maritim harus diperluas sesuai dengan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Pada saat yang sama, ruang lingkup strategi ofensif angkatan lautnya juga harus diperluas. Dengan perluasan kepentingan nasional dan kekuatan laut kekuatan maritim, strategi ofensif angkatan lautnya, dan cakupan geografis di mana strategi tersebut diterapkan akan meluas dari perairan lepas pantai ke dunia. Kekuatan laut ini, yang terkait dengan perluasan kepentingan nasional yang diketahui sebagai upaya hegemoni laut.

Strategi Pertahanan Laut Indonesia

Indonesia saat ini berada di posisi tensi tinggi antara AUKUS dan Republik Rakyat Tiongkok melalui Laut China Selatan. Perjanjian AUKUS, yang melihat Australia memperoleh teknologi AS yang berharga untuk membangun armada kapal selam bertenaga nuklir, secara luas dipandang sebagai pencegahan strategis oleh Washington dan Canberra terhadap ekspansi angkatan laut agresif China di Laut China Selatan. Terletak di antara Cina dan Australia, kepulauan Indonesia yang luas memiliki jalur laut strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik serta menghubungkan Laut Cina Selatan dengan perairan di lepas pantai Australia utara. Kapal selam dapat lewat tanpa terdeteksi melalui parit laut dalam.

Indonesia menanggapi kesepakatan AUKUS dengan mengungkapkan keprihatinan mendalam atas berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan dalam pernyataan lima poin yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri di bulan September (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2021). Pernyataan ini juga mendesak penghormatan terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang mengatur navigasi melalui perairan internasional.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan Indonesia khawatir bahwa akuisisi kapal selam nuklir Australia akan memacu perlombaan senjata dan ketidakstabilan regional. Pernyataan yang dikeluarkan meliputi:

1. Indonesia memperhatikan dengan hati-hati keputusan Pemerintah Australia untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir
2. Indonesia sangat prihatin atas berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan.
3. Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi semua kewajiban non-proliferasi nuklirnya.
4. Indonesia meminta Australia untuk menjaga komitmennya terhadap perdamaian, stabilitas dan keamanan regional sesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerjasama.
5. Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memajukan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam hal ini, Indonesia menggarisbawahi penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, dalam

menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

Bagi Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara, konteks di mana AUKUS tiba telah menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan dan tindakan balasan reaksioner dari China dan sekutunya, yang memandang diri mereka sebagai target pakta tersebut. Walaupun pencegahan mungkin berpengaruh dalam jangka panjang, tantangan Indonesia dalam jangka pendek akan tetap sama. Indonesia masih berada di tengah-tengah rencana untuk memodernisasi militernya, khususnya kapasitas angkatan lautnya, untuk memaksakan kontrol yang lebih besar atas bentangan air yang sangat besar di bawah pengawasannya. Tetapi sekarang juga harus menghadapi peningkatan kehadiran kapal selam berkapasitas lebih tinggi dan kemungkinan tanggapan dari negara-negara yang terancam oleh pembangunan (khususnya China), dalam bentuk teknologi anti-kapal selam yang lebih maju dan lainnya. Teknologi Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol atau bahkan mengamati dengan benar.

Melihat strategi pertahanan laut yang akan diterapkan oleh Indonesia, Indonesia masih akan mengedepankan strategi Poros Maritim Dunia sebagai pedoman utama dilihat dari empat area meliputi landasan pemikiran strategis maritim Indonesia, prinsip-prinsip kebijakan luar negeri dan maritim Indonesia, interaksi antara konsep Poros Maritim Dunia dan pemikiran strategis maritim Indonesia, dan terakhir, strategi maritim yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan Poros Maritim Dunia yang telah ditetapkan (Supriyanto, 2016).

Berdasarkan kondisi geografis, Kebutuhan untuk mengembangkan strategi maritim berasal dari fakta sederhana geografi kepulauan Indonesia, yang menggarisbawahi dua elemen mendasar dalam pemikiran strategisnya: gagasan persatuan nasional di tengah geografi yang terfragmentasi dan dilema persimpangan maritim. Meskipun laut nusantara dapat berfungsi sebagai media interaksi antar penduduk pulau, namun juga dapat menjadi sumber perpecahan karena memisahkan “pulau-pulau satu sama lain secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya”. Dalam kasus Indonesia, laut telah menjadi media alami untuk mempromosikan persatuan nasional melalui interaksi sosial budaya dan

kontrol politik, masing-masing cara "lunak" dan "keras" untuk mencapai persatuan nasional. Lebih penting lagi, letak geografis Indonesia menghadirkan dilema persimpangan maritim. Terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, kepulauan ini membentuk jalur air penting, atau dikenal sebagai jalur komunikasi laut, untuk pelayaran global. Kedua samudera tersebut terhubung melalui selat-selat di Nusantara, terutama Selat Malaka, Sunda, Lombok, dan Ombai-Wetar.

Dalam prinsip kebijakan luar negeri dan maritime Indonesia, Persatuan nasional Indonesia yang rapuh dan dilema persimpangan jalan maritimnya menimbulkan kewaspadaan yang terus-menerus terhadap kekuatan maritim asing yang mencari akses tak terbatas ke atau melalui nusantara untuk tujuan militer. Dengan demikian, membatasi akses tersebut menjadi tujuan strategis utama. Dalam memenuhi tujuan ini, Indonesia percaya bahwa ia tidak boleh mengadakan aliansi formal dengan kekuatan asing untuk mencegah yang terakhir dari campur tangan dalam upaya untuk mengatur domain maritimnya sendiri. Pemikiran strategis Indonesia juga tercermin dalam dua prinsip utama kebijakan maritime yakni prinsip

nusantara dan wawasan nusantara. Semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang merupakan negara Indonesia, tanpa memandang luasnya, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari wilayah negara Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman nasional yang berada di bawah kedaulatan eksklusif negara Indonesia.

Kesimpulan

Melihat bahwa terdapat upaya dominasi negara-negara di Kawasan Asia Pasifik oleh Republik Rakyat China dan direspon oleh Amerika Serikat melalui AUKUS, Indonesia perlu mengkaji kembali penerapan Poros Maritim Dunia sebagai strategi pertahanan laut yang digaungkan dalam menghadang tendensi konflik di wilayah perairan Laut China Selatan dan wilayah perbatasan dengan Australia. Indonesia yang terus mengedepankan politik non-blok dan bebas aktif nyatanya harus berbenah dalam melihat kompetisi antar negara-negara besar di Kawasan Asia Pasifik. Hal ini terlihat dari pernyataan Indonesia dalam merespon isu terkait pembentukan AUKUS yang hanya menyampaikan sesuatu dengan simpatik dan

menyayangkan keputusan negara lain tanpa adanya tindakan yang direncanakan dalam meminimalisir tendensi konflik yang dapat membahayakan Indonesia secara langsung.

Walaupun AUKUS dapat dilihat sebagai mitra dalam pengembangan teknologi angkatan laut Indonesia, akan tetapi aliansi ini tentunya akan memperburuk suasana konflik di Kawasan Asia Pasifik. Indonesia sangat membutuhkan bantuan dari negara-negara lain untuk menjaga potensi ancaman di sekitarnya. Negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara khususnya memiliki permasalahan yang sama akan tetapi masih kurang dalam upayanya membantu pertahanan negara-negara tetangganya. Indonesia harus mengoptimalkan konsep Poros Maritim Dunia sebagai bentuk pertahanan maritim dengan mempertimbangkan kekuatan geografis, wawacan nusantara, prinsip nusantara, dan kekuatan laut. Hal yang harus diperhatikan yakni peranan tentara angkatan laut Indonesia harus terus ditingkatkan melalui pengembangan teknologi alutsista yang mendukung, peningkatan skill para tentara dalam upaya spionase terhadap pergerakan Republik Rakyat Tiongkok

dan AUKUS, serta memperhatikan lebih dalam wilayah-wilayah perbatasan khususnya perbatasan laut Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bamboo Cyberschool. (2019, Januari 16). *Letak Geografis Negeri China, Negeri Tirai Bambu*. Retrieved from Bamboo Cyberschool: <https://www.bamboocyberschool.com/post/letak-geografis-negeri-china-negeri-tirai-bambu-2>
- Belt and Road Initiative. (2021, November 19). *Belt and Road Initiative*. Retrieved from Belt and Road Initiative: <https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/>
- Brooke-Holland, L., Curtis, J., & Mills, C. (2021). *The Aukus Agreement*. London: House of Commons Library.
- Corbett, J. S. (2004). *Principles of Maritime Strategy*. New York: Dover Publications.
- Gao, Z., & Ja, B. B. (2013). Nine Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications. *American Society of International Law*, 98-124.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2021, September 17). *Statement on Australia's Nuclear-powered Submarines Program*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/en/read/2937/siaran_pers/statement-on-australias-nuclear-powered-submarines-program
- Magdalena, J. V. (2021, Januari 6). *Implikasi Belt and Road Initiative Tiongkok Terhadap Neraca Perekonomian*. Retrieved from Pusat Studi Kawasan LIA:

<http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/implikasi-belt-and-road-initiative-tiongkok-terhadap-neraca-perekonomian-indonesia.html>

Mahan, A. T. (1890). *The Influence of Sea Power Upon History*. Boston: Little, Brown, and Company.

OECD. (2018). *China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment, and Finance Landscape*. Paris: OECD Business and Finance.

Parliament of Australia. (2018). *Maritime Strategy Concept*. Canberra: Parliament of Australia.

Prime Minister of Australia. (2021). *Australia To Pursue Nuclear Powered Submarines Through New Trilateral Enhanced Security Partnership*. Canberra: Australia Government.

Sakamoto, S. (2021). *Historic Waters and Rights Revisited: UNCLOS and Beyond?* Kyoto: Doshisha University.

Sea Power Centre Australia. (2013). *What is a Maritime Strategy?* Canberra: Sea Power Centre Australia.

Supriyanto, R. A. (2016). *Developing Indonesia's Maritime Strategy under President Jokowi*. Seoul: The Asan Forum.

Suwanti, & Suharto. (2020, Oktober 24). *Several non-claimant states reject China's claim in the South China Sea*. Retrieved from Antaranews.com: <https://en.antaranews.com/news/159725/several-non-claimant-states-reject-chinas-claim-in-south-china-sea>

Thao, N. H., & Amer, R. (2012). A New Legal Arrangement for the South China Sea. *Ocean Development International*, 333-334.

Thayer, C. A. (2016, November 14). *The Southeast Asia Claimant States, ASEAN and the South China Sea*. Retrieved from Maritime Issues: <http://www.maritimeissues.com/politics/the-southeast-asia-claimant-states-asean-and-the-south-china-sea-dispute.html>

United States of Amerika. (2021). *Joint Leaders Statement on AUKUS*. Washington DC: White House Government.

University of Birmingham. (2015). *Learn from the Sea Power Theory and Geopolitical Theory*. Birmingham: University of Birmingham.

Wang, Z. (2015). Chinese Discourse on the "Nine-Dashed Line": Rights, Interests, and Nationalism. *Asian Survey*, 502-524.